



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : BALAI BESAR POM DENPASAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I MADE BAGUS GERAMETTA
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NHK : 405540

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.077.800.000

1. Tanah Seluas 2.364 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 110.000.000
2. Tanah Seluas 4.068 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 190.000.000
3. Tanah Seluas 4.286 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 1.447 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 4.047 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 190.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 864 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HIBAH TANPA AKTA Rp. 177.800.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/73 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HIBAH TANPA AKTA Rp. 35.000.000
8. Tanah Seluas 367 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 223.000.000

1. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOTOR, HONDA SPD MTR SL Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA 2.0 V MT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	85.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.994.811.779
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.380.611.779
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.380.611.779

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.